



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
LAPORAN SINGKAT  
KOMISI II DPR RI  
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI  
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN  
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

---

Tahun Sidang	: 2019-2020
Masa Persidangan	: IV
Rapat Ke-	: 6
Jenis Rapat	: Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Rabu, 24 Juni 2020
Waktu	: Pukul 10.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: 1. Pembicaraan Pendahuluan dan Pembahasan RABN TA 2021 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021; 2. Evaluasi Kinerja Tahun 2019 dan 2020 (hingga bulan Juni Tahun 2020); 3. Upaya dan Kinerja Pemerintah Daerah dalam Menangani Pandemi <i>Corona Virus Desease</i> (Covid-19).
Ketua Rapat	: <b>H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung/Ketua Komisi II DPR RI</b>
Sekretaris Rapat	: Dra. Hani Yuliasih, M.Si./Kabag Set Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 12 (dua belas) Anggota Komisi II DPR RI secara fisik dan 21 (dua puluh satu) Anggota Komisi II DPR RI secara virtual dari 49 (empat puluh Sembilan) Anggota Komisi II DPR RI B. Menteri Dalam Negeri RI C. Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan D. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

## **I. PENDAHULUAN**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri RI /Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, dengan agenda pembicaraan pendahuluan dan pembahasan RABN TA 2021 dan rencana kerja Pemerintah Tahun 2020, evaluasi kinerja Tahun 2019 dan 2020 (hingga bulan Juni Tahun

2020) dan upaya dan kinerja Pemerintah Daerah dalam menangani pandemi *Corona Virus Desease (Covid-19)*, hari Rabu, 24 Juni 2020, dibuka pukul 10.15 WIB oleh Ketua Komisi II DPR RI, H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung dan dinyatakan terbuka untuk umum.

## II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Pembahasan pada rapat tersebut, sebagai berikut:

1. Menteri Dalam Negeri/Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan menyampaikan Pagu Indikatif Kementerian Dalam Negeri/Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Kemendagri/BNPP) sebesar **Rp3.203.700.438.000,-** (*tiga trilyun dua ratus tiga milyar tujuh ratus juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah*), termasuk di dalamnya adalah anggaran untuk Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebesar **Rp10.720.000.000,-** (*sepuluh milyar tujuh ratus dua puluh juta rupiah*). Pagu Indikatif Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) sebesar **Rp227.704.562.000,-** (*dua ratus dua puluh tujuh milyar tujuh ratus empat juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah*)
2. Menteri Dalam Negeri mengajukan usulan tambahan anggaran Kemendagri sebesar **Rp1.275.386.488.000,-** (*satu trilyun dua ratus tujuh puluh lima milyar tiga ratus delapan puluh enam juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah*) untuk dapat ditambahkan ke dalam pagu anggaran Kementerian PANRB Tahun 2021.
3. Kepala DKPP mengajukan usulan tambahan anggaran DKPP sebesar **Rp91.949.051.000,-** (*sembilan puluh satu milyar sembilan ratus empat puluh sembilan juta lima puluh satu ribu rupiah*) untuk dapat ditambahkan ke dalam pagu anggaran BKN Tahun 2021.
4. Menteri Dalam Negeri/Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan menyampaikan capaian kinerja pada tahun 2019, dan berbagai langkah strategis yang dilakukan dalam mendukung upaya percepatan penanganan Covid-19.

## III. KESIMPULAN RAPAT

1. Setelah mendengarkan penyampaian Pagu Indikatif RAPBN Tahun 2021:
  - a. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebesar **Rp3.203.700.438.000,-** (*tiga trilyun dua ratus tiga milyar tujuh ratus juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah*), termasuk di

dalamnya adalah anggaran untuk Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebesar **Rp10.720.000.000,-** (sepuluh milyar tujuh ratus dua puluh juta rupiah);

- b. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) sebesar **Rp227.704.562.000,-** (dua ratus dua puluh tujuh milyar tujuh ratus empat juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Maka Komisi II DPR RI meminta agar dalam pengalokasian anggaran per program dan kegiatan senantiasa memperhatikan saran dan masukan yang disampaikan oleh Komisi II DPR RI, yang kemudian akan dibahas kembali secara lebih mendalam pada rapat pembahasan RAPBN 2021 selanjutnya.

2. Komisi II DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran Kemendagri sebesar **Rp1.275.386.488.000,-** (satu trilyun dua ratus tujuh puluh lima milyar tiga ratus delapan puluh enam juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), termasuk didalamnya adalah usulan tambahan anggaran DKPP sebesar **Rp91.949.051.000,-** (sembilan puluh satu milyar sembilan ratus empat puluh sembilan juta lima puluh satu ribu rupiah), untuk dapat ditambahkan ke dalam pagu anggaran Kemendagri Tahun 2021, dan meminta kepada Anggota Badan Anggaran Komisi II DPR RI memperjuangkannya dalam pembahasan di Badan Anggaran DPR RI.

#### IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.35 WIB.

Jakarta, 24 Juni 2020

KETUA RAPAT



**H. AHMAD DOLI KURNIA PANDJUNG**

**A-270**